



**REKOMENDASI RAPAT KERJA PIMPINAN
MUHAMMADIYAH DISASTER MANAGEMENT CENTER
(LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA PP MUHAMMADIYAH)**

“Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana dalam Masa Pandemi Covid-19”

Indonesia sejak Maret 2020 resmi menjadi bagian dari negara yang mengalami pandemi Covid-19, karena itu Persyarikatan Muhammadiyah sebagai lembaga yang memiliki basis dakwah dan amal usaha kemasyarakatan di Indonesia menjadi bagian dari elemen bangsa yang terdampak sekaligus ikut aktif dalam penanganan pandemi tersebut.

Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah atau yang juga disebut sebagai Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) menjadi salah satu unsur penopang utama upaya Muhammadiyah tersebut, yang disatukan dalam semangat One Muhammadiyah One Response sebagai Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC).

Selama pandemi Covid-19 berlangsung potensi kejadian bencana diluar Covid-19 terus terjadi sehingga kerja-kerja kemanusiaan dalam penanganan kejadian tanggap darurat, pemulihan, penguatan komunitas dan sistem masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana, peningkatan kompetensi pelaku penanggulangan bencana harus terus dilakukan. Ditambah kerja-kerja penguatan jaringan kerjasama dan penguatan sistem kepemimpinan dan organisasi penanggulangan bencana di Muhammadiyah yang tidak kalah penting untuk tetap dilakukan.

Karena itu, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) merekomendasikan

A. Kepada seluruh jaringan MDMC di Seluruh Indonesia :

1. Komitmen bersama mengawal perubahan fokus penanggulangan bencana dari **tanggap darurat bencana terpusat** ke **pengurangan risiko bencana berbasis komunitas** menemukan momentumnya di masa pandemi Covid-19 ini yang menjadikan mobilitasi relawan, fasilitator dan bantuan antar daerah adalah pilihan terakhir sebagai bagian dari manajemen risiko pandemi Covid-19 dan prinsip *hifdzun ad-nafs* atau mengutamakan keselamatan nyawa.
2. Perkuatan sistem pengurangan risiko bencana di keluarga, komunitas dan jamaah sesuai prinsip-prinsip Masyarakat Tangguh Bencana (MASTANA), Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), dan Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB) yang telah menjadi komitmen Muhammadiyah 10-15 tahun terakhir harus terus diperkuat dengan disesuaikan sesuai kondisi pandemi dimana penegakan protokol kesehatan tidak bisa ditawar penerapannya, karena pada masa pandemi inilah implementasi konsep-konsep tersebut menjadi sangat dibutuhkan.

3. Memperkuat proses kesiapsiagaan darurat dan tanggap darurat bencana yang dilakukan jaringan Muhammadiyah di seluruh Indonesia dengan perkuatan manajemen keselamatan relawan, pelaksana program dan warga terdampak sesuai kondisi pandemi Covid-19 yang mewajibkan penegakan protokol kesehatan dan memprioritaskan penanganan tanggap darurat oleh relawan lokal dan terlibat dalam mekanisme koordinasi klaster/sektor.
4. Memperkuat jaringan organisasi, relawan, fasilitator dan kerjasam dengan mitra sebagai upaya mendukung proses perkuatan sistem pengurangan risiko bencana dan proses tanggap darurat bencana berbasis komunitas, disesuaikan dengan kondisi pandemi. Serta berperan aktif dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kota-Kabupaten
5. Menjadi teladan penerapan protokol kesehatan covid-19 dan memperkuat keberadaan Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) di semua tingkatan pimpinan persyarikatan Muhammadiyah.
6. Menjadi mitra strategis & pelaksana bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam sinergitas penanggulangan covid-19.

B. Kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah :

1. Memprioritaskan kebijakan dan anggaran penerapan prinsip pengurangan risiko bencana berbasis komunitas pada masa pandemi sebagai upaya memastikan ketangguhan kelompok masyarakat terkecil untuk menghadapi segala ancaman bencana, karena mobilitasi antar daerah bagi relawan dan bantuan bencana harus ditekankan dimasa pandemi ini.
2. Memperkuat sistem tanggap darurat bencana multihazard pada masa pandemi di komunitas dengan dukungan sistem komunikasi, logistik dan supervisi yang kuat dengan tetap sesuai protokol kesehatan Covid-19
3. Memperkuat kerjasama antara pemerintah/pemerintah daerah dengan kekuatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya penanganan bencana alam maupun pandemi Covid-19 agar lebih efektif dan berbasis kekuatan riil masyarakat di tingkat lokal.
4. Agar setiap perumusan kebijakan dan strategi penanganan pandemi pemerintah dan pemerintah daerah selalu mendasarkan ada data (*evidence*) serta berpijak pada pendapat para ahli di bidangnya (*scientific-based approach*) dengan mengedepankan keselamatan rakyat di atas kepentingan lainnya.
5. Agar setiap kebijakan yang disusun dalam merespon bencana alam maupun pandemi Covid 19 sensitif terhadap perempuan dan kelompok rentan.
6. Memprioritaskan upaya perlindungan keselamatan relawan dan warga terdampak pada kegiatan tanggap darurat dan pemulihan bencana alam di masa pandemi dengan adanya asuransi, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), perangkat tracing dan testing, termasuk infrastuktur isolasi bila ada relawan atau warga terdampak bencana alam terkonfirmasi Covid-19.

Yogyakarta, 9 Januari 2021